



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUFFANA QOMAH**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **520786**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1.872.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/135 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 350.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.100.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
5. Tanah Seluas 4000 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 26.500.000
6. Tanah Seluas 4000 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 26.500.000
7. Tanah Seluas 2000 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
8. Tanah Seluas 6000 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 39.500.000
9. Tanah Seluas 4000 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 26.500.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

147.900.000



1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.700.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.700.000
5. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	325.773.105
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.362.973.105
III. HUTANG	Rp.	650.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.712.973.105

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.